



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT IKAN AIR LAUT TAHUN 2024



DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
KATA PENGANTAR.....	7
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	12
1.3. Tugas dan Fungsi	12
a. Sumber Daya Manusia	13
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya.....	14
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya	16
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024	17
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	24
SS.1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya bidang Ikan Air Laut..	24
IKU 1 Tenaga kerja yang terlibat di bidang ikan air laut (orang).....	24
SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budidaya yang direvitalisasi	25
IKU 2 Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)	25
IKU 3 Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)....	27
IKU.4 Kawasan perikanan budidaya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan).....	29
SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	31
IKU.5 Persentase sarana kawasan budidaya yang dimanfaatkan masyarakat (%)...	31
IKU.6 Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (paket).....	36
SS 4. Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan.....	38
IKU 7. Presentase NSPK bidang kesehatan ikan yang disusun (%)	38

IKU 8. Tingkat kualitas implementasi <i>National Residu Monitoring Plan</i> (%).....	40
IKU 9. Indeks pengendalian penyakit ikan (skala).....	45
IKU 10. Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)	48
SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut	51
IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%).....	51
IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	54
IKM.13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut(%)	55
IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%).....	57
IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%).....	58
IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan (%)	60
IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%).....	65
IKM.18. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)	66
IKM.19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (%).....	67
BAB IV. PENUTUP.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut Pasca Transformasi Jabatan Fungsional Tahun 2023	13
Gambar 2. Potensi Perikanan Budi Daya	14
Gambar 3. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024	16
Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024	17
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan 2024.....	19
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024	20
Gambar 7. <i>Screenshot</i> NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerja Triwulan III Tahun 2024	21
Gambar 8. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.....	52
Gambar 9. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024.....	13
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2024.....	22
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Ikan Air Laut (orang) Triwulan IV Tahun 2024.....	25
Tabel 4. Tenaga Kerja yang terlibat di Bidang Ikan Air Laut Taun 2024	265
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Triwulan IV Tahun 2024....	26
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Triwulan IV Tahun 2024	28
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Triwulan IV Tahun 2024	30
Tabel 8. Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi.....	30
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Triwulan IV Tahun 2024	32
Tabel 10. Daftar Excavator yang telah Didistribusikan ke Masyarakat Hingga Triwulan IV Tahun 2024.....	32
Tabel 11. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Triwulan IV Tahun 2024	377
Tabel 12. Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) TA. 2024.....	377
Tabel 13. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024	38
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%).....	399
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2024....	39
Tabel 16. Judul dan Konseptor Rapat Teknis RSNI 3 bidang Kesehatan Ikan 2024	40
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) Triwulan IV Tahun 2024.....	411
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi NRMP (%) di 26 Provinsi	422
Tabel 19. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Tahun 2024.....	453
Tabel 20. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)	45
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit ikan (Skala) Tahun 2024	475
Tabel 22. Hasil pengujian sampel positif dalam monitoring penyakit ikan tahun 2024	496
Tabel 23. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Tahun 2024	Error!
Bookmark not defined.7	
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Tahun 2024	49
Tabel 25. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Bakteri Patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Tahun 2024	540
Tabel 26. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB .	560
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024.....	533
Tabel 28. Perbandingan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Semester II Tahun 2024 Lingkup DJPB	573
Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) Tahun 2024	584

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024	606
Tabel 31. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	546
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024	567
Tabel 33. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024	568
Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024	579
Tabel 35. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	60
Tabel 36. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024	60
Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024	61
Tabel 38. Perbandingan Capaian Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan di Unit Eselon II Pusat Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024	61
Tabel 39. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2024	62
Tabel 40. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2024	63
Tabel 41. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	643
Tabel 42. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Tahun 2024	644
Tabel 43. Layanan Rapat Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024	664
Tabel 44. Indeks Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024	675
Tabel 45. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Tahun 2024	696
Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Tahun 2024	696
Tabel 47. Capaian Indikator Kinerja Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Tahun 2024	697
Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 ...	699
Tabel 49. Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024	699

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 14 Januari 2025

Direktur Ikan Air Laut



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan, S.Pi, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2024, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024:

a) Terdapat 15 (lima belas) Indikator kinerja dari 5 (lima) Sasaran Strategi yang capaiannya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

- SS1. Terserapnya tenaga kerja sektor Perikanan Budi Daya bidang Ikan Air Laut**, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu : Tenaga kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (Orang).
- SS2. Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi**, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu : Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan).
- SS3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan**, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu: (i) Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%) dan (ii) Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (Paket).
- SS4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan**, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu: (i) Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%); (ii) Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%); (iii) Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) dan (iv) Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%).
- SS5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut**, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: (i) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), (ii) Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%); (iii) Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%); (iv) Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%); (v) Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%); dan (vi) Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)

- b) Terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategi yang capaiannya dibawah target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

SS5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : (i) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (ii) Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai), dan (iii) Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut.

- c) Terdapat 2 (dua) Indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategi yang capaiannya sama dengan target tahunan yang ditetapkan, yaitu:

SS2. Meningkatkan Kawasan Perikanan Budi daya yang Direvitalisasi, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) dan (ii) Kawasan budi daya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 78,94% Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, 10,53% Indikator Kinerja di bawah target yang ditetapkan, dan 10,53% Indikator Kinerja sama dengan target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “Istimewa” dengan nilai **111,13**. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 4. Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)**, terdapat tambahan paket kegiatan PITAP pada Triwulan IV yang berdampak pada 12 (dua belas) kawasan budidaya mendapatkan kemudahan pengairan dari terehabilitasinya saluran tambak sepanjang 16.152,10 m dan luas lahan tambak yang terairi sebesar 934,54 Ha;
2. **IKU 5. Persentase Sarana Kawasan Budi daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%)**, telah dimanfaatkannya 75 unit dari 95 unit excavator yang telah disalurkan ke masyarakat.
3. **IKU 6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)**, tambahan paket kegiatan PITAP sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan pada Triwulan IV sehingga capaian melebihi target tahunan yang ditetapkan.
4. **IKU 7. Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan (NRMP)* (%)**, tambahan sampel monitoring residu sebanyak 95 sampel pada Triwulan IV, yang berdampak pada capaian sampel monitoring residu yang melebihi target tahunan atau 4.000 sampel;
5. **IKU 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)**, perolehan sampel AMR yang diuji telah melebihi target sehingga lebih menggambarkan kondisi resistensi di wilayah budidaya yang dimonitor.
6. **IKU 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)**, mengupayakan secara optimal pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja.
7. **IKU 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah dilakukan upaya penyelesaian terdapat temuan

dan saran dari LHP Itjen meskipun masih tersisa 1 (satu) temuan dan 1 (satu) saran yang belum lengkap data dukungannya.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budi Daya 2020 - 2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2024, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

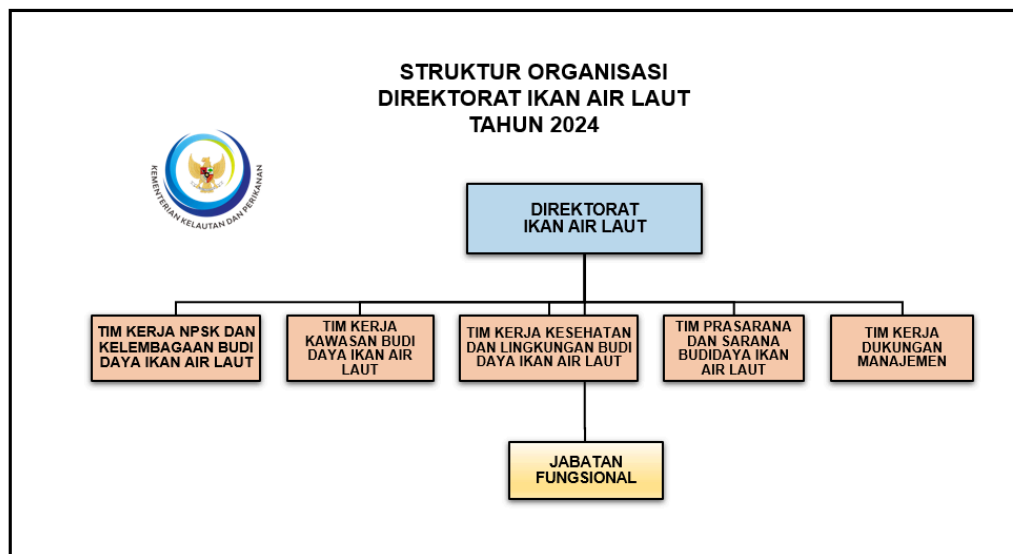
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air laut. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pemanfaatan dan perikanan pengelolaan budi daya, kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 5) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 1,96%, S2 sebanyak 17,64%, S1 sebanyak 74,51%, D3 sebanyak 1,96%, SMA sebanyak 1,96% dan SMP sebanyak 1,96%.

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

No.	Nama Organisasi	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Direktur	-	1	-	-	-	-	1
2	Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut	-	2	7	-	-	-	9
3	Tim Kerja Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya	-	3	9	-	-	-	12
4	Tim Kerja Kesehatan dan Lingkungan Budi Daya Ikan Air Laut	-	2	7	-	-	-	9
5	Tim Kerja NSPK dan Kelembagaan	-	3	4	-	-	-	7
6	Tim Kerja Dukungan Manajemen	-	-	4	2	6	-	12
7	Pengawas Perikanan Utama	1	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		1	11	30	2	6	-	51

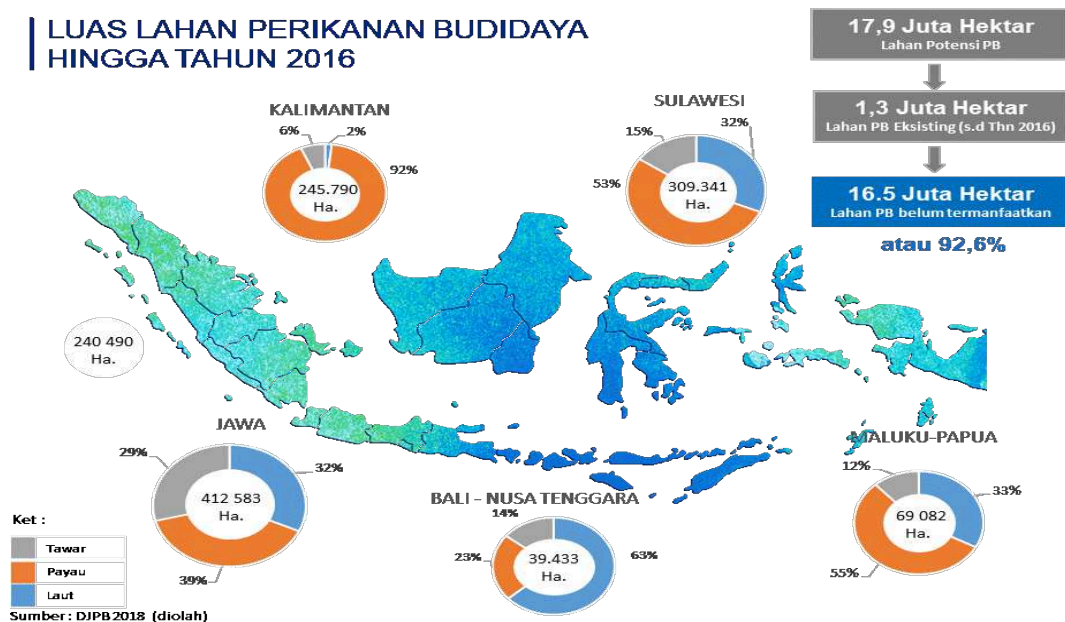
Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 51 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil 40 orang,
- b. Pegawai PPPK 4 orang dan
- c. Pegawai Tenaga Kontrak 7 orang.

Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Ikan Air Laut tersebar di Timja Dukungan Manajemen sebanyak 3 (tiga) orang, Timja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut sebanyak 2 (dua) orang, dan Tim Kerja Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan Air Laut sebanyak 2 (dua) orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



Gambar 2. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan

bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

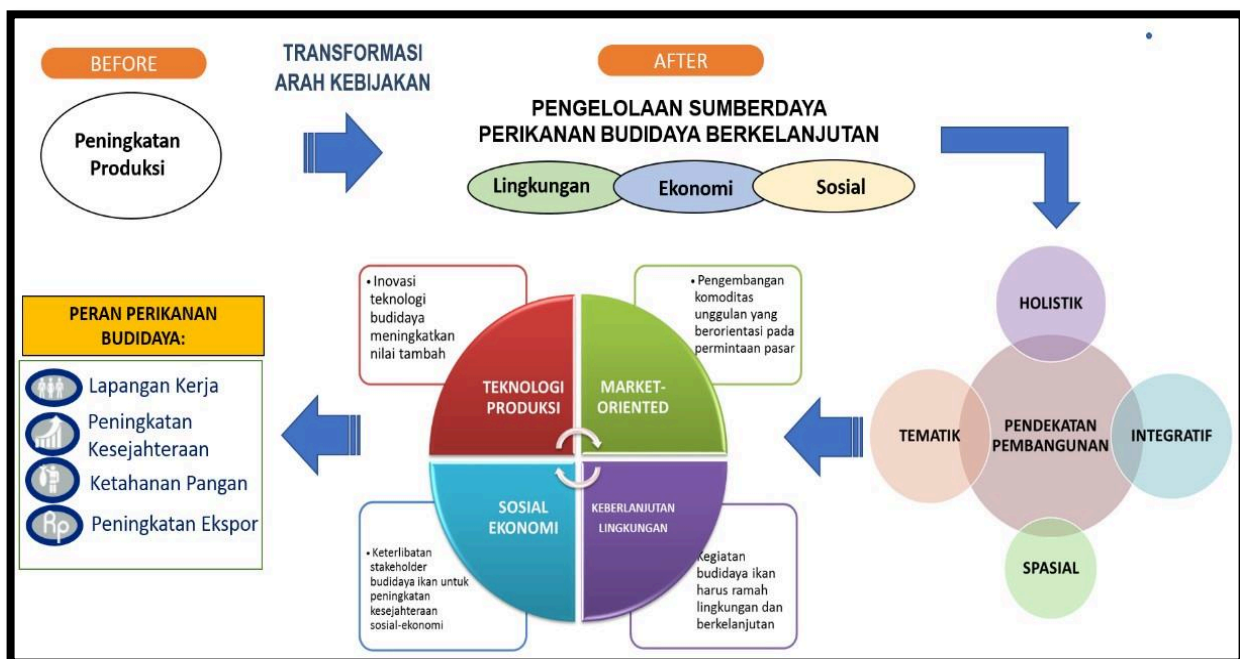
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKJ Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 selama kurun waktu Januari – Desember 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budi Daya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 3. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut

kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**
Jabatan : **Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

Tb. Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Orang)	680
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	9
		3. Kawasan budidaya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1
		4. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/ Irigasi (Kawasan)	8
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5. Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang dimanfaatkan Masyarakat (%)	75
		6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)	10
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	7. Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan (NRMP)</i> (Persen)	94
		8. Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (Persen)	75
		9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2
		10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan terhadap Antimikroba (Persen)	35
5.	Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	82
		13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		14. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	
		15. Tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		16. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
		18. Data Geospasial yang Terintegrasi Bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)	1
		19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	98

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	429,050,000,000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	678,640,000
Total Anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024		429,728,640,000,-

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan



Tb. Haeru Rahayu



Tinggal Hermawan

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya mengamanatkan Nomenklatur baru di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, maka Perjanjian Kinerja Dit. Kawasan dan Kesehatan Ikan mengalami penyesuaian menjadi Perjanjian Kinerja Dit. Ikan Air Laut sebagai berikut :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
 e-MAIL: ditjenperikanan@korpri.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**
 Jabatan : **Direktur Ikan Air Laut**
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
 Direktur Ikan Air Laut

Tb Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terserapnya tenaga kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Laut	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Ikan Air Laut (Orang)	164
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster) 3. Kawasan budidaya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) 4. Kawasan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/ Irigasi (Kawasan)	9 1 8
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5. Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) 6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)	75 10
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	7. Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (Persen) 8. Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Diausun (Persen) 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan terhadap Antimikroba (Persen)	94 75 2 35
5.	Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Direktorat Ikan Air Laut	11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen) 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (Persen) 14. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang	85 82 80 94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	
15.		Tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
16.		Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
17.		Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
18.		Data Geospasial yang Terintegrasi Bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)	1
19.		Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	98

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	418.102.250.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.800.000.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024		419.902.250.000

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
 Direktur Ikan Air Laut

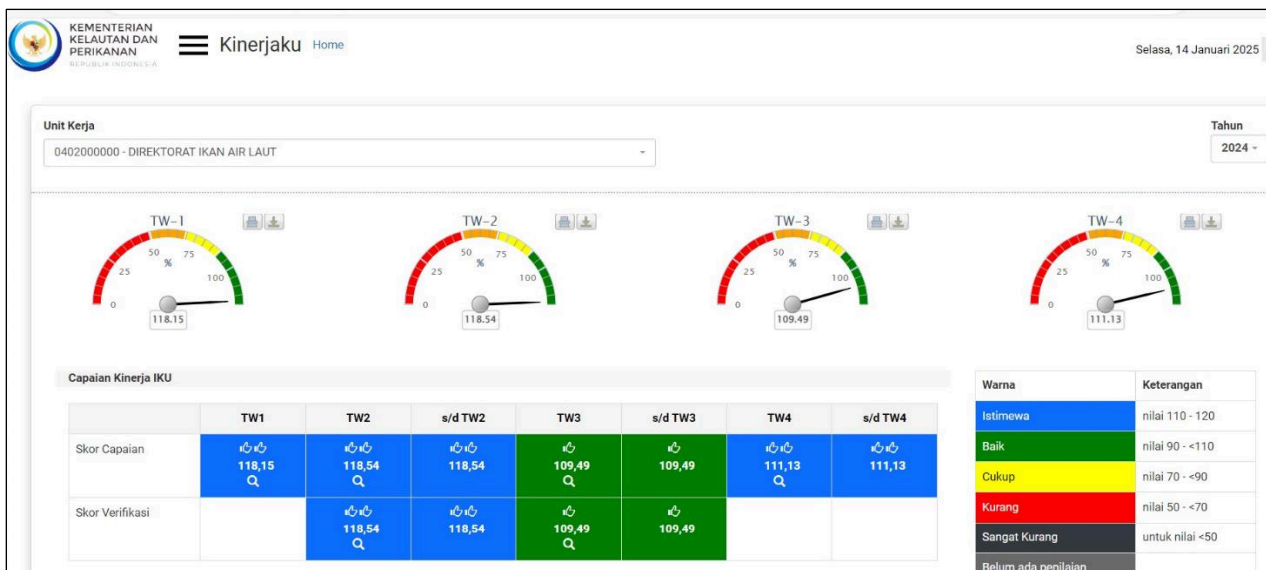
Tb Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 7. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan budidaya ikan air laut pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 13 (tiga belas) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 5 (lima) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Peng-Hitungan
1	Tersempurnya tenaga kerja sektor Perikanan Budi Daya bidang Ikan Air Laut	1	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (Orang)	164	178	108,54	Tahunan
2	Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi	2	Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)	9	9	100	Tahunan
		3	Kawasan budi daya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1	1	100	Tahunan
		4	Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)	8	12	>120	Tahunan
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	5	Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%)	75	78,95	105,27	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Peng-Hitungan
		6	Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (Paket)	10	14	140	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas pengendalian Kesehatan Ikan	7	Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (%)	94	95,56	101,66	Tahunan
		8	Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)	75	100	>120	Triwulan
		9	Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2	3	>120	Tahunan
		10	Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)	35	14,05	>120	Tahunan
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85	84,18	99,03	Semesteran
		12	Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	82	81,55	99,45	Tahunan
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)	80	92,68	115,85	Triwulanan
		14	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)	94	133,33	>120	Triwulan
		15	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)	80	92,88	116,10	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Peng-Hitungan
		16	Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)	80	94,77	118,46	Triwulan
		17	Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)	91	184,19	>120	Tahunan
		18	Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)	1	2	>120	Tahunan
		19	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut	98	97,69	99,68	Triwulan

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS.1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya bidang Ikan Air Laut

Sasaran Strategis Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Ikan Air Laut memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (Orang)

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Budi daya Ikan Air Laut (orang) didefinisikan Jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam kegiatan pembenihan ikan air laut sebanyak 154 orang dan Bantuan Calon Induk sebanyak 10 orang.

Penanggung Jawab Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (orang) berada di Tim Kerja Kelembagaan dan NSPK. Pengukuran penghitungan indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di bidang Ikan Air Laut (orang) dihitung berdasarkan tenaga Kerja yang terlibat langsung pada kegiatan bantuan pembenihan ikan air laut dan bantuan calon induk yang diperoleh dari 4 (empat) UPT Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu : (i) BPBL Batam, (ii) BBPBL Lampung, (iii) BPBL Lombok dan (iv) BPBL Ambon.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (orang) Tahun 2024

2020	Realisasi				2024			Renstra 2020-2024	
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	178	164	178	103,09	-	>120

Pengukuran Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Ikan Air Laut (orang) Tahun 2024 dilakukan secara Tahunan, dengan realisasi sebanyak 178 orang atau tercapai 108,54% dari target tahunan. Pengukuran indikator tersebut baru dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan terjadi perubahan SOTK sehingga menyesuaikan nomenklatur yang baru yaitu Direktorat Ikan Air Laut. Realisasi Triwulan IV tahun 2023 yang ditangani sebelumnya di Direktorat Perbenihan masih berupa bantuan benih dan calon induk untuk semua jenis ikan (ikan air tawar, ikan air laut, ikan air payau dan rumput laut).

Tabel 4. Tenaga Kerja yang terlibat di Bidang Ikan Air Laut Tahun 2024

No	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (Ekor)		Tenaga Kerja Yang Terlibat (Orang)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Benih Ikan Air Laut	2.318.258	2.488.370	154	166
2.	Calon Induk Ikan Air Laut	144	200	10	12
Jumlah Total				164	178

Besarnya capaian jumlah tenaga kerja yang terserap terdiri dari tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan bantuan benih ikan air laut dengan jumlah 166 orang atau 107,79% dari target 154 orang dan bantuan calon induk ikan air laut sebanyak 12 orang atau 120% dari target 10 orang. Selama kegiatan penyaluran bantuan benih dan calon induk ikan air laut tidak ada kendala yang dihadapi terkait dengan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan bantuan tersebut.

SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 2. Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)

Kluster tambak yang siap operasional meliputi pembangunan kluster tambak udang dan revitalisasi tambak bandeng dengan kriteria sebagai berikut:

- Kluster tambak udang siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak udang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana budidaya, seperti jaringan listrik, kincir, dan plastik pelapis tambak (lining).

- Sedangkan kluster tambak bandeng siap operasional merupakan revitalisasi kawasan tambak bandeng yang difasilitasi dengan sarana produksi berupa benih dan pakan ikan.

Target indikator kinerja Kluster tambak yang siap operasional, terdiri dari : (a) pembangunan kluster tambak udang, dengan target 2 kluster dan (b) revitalisasi kluster tambak bandeng, dengan target 7 kluster. Jumlah usaha budidaya tambak dengan konsep kawasan tambak udang dan bandeng sebanyak 9 kluster, terdiri dari : 2 kluster tambak udang dan 7 kluster tambak bandeng dikerjakan oleh UPT DJPB dengan rincian : **(a) BPBAP Situbondo:** 1 tambak udang di Kabupaten Pangandaran dan 1 tambak bandeng di Kabupaten Gresik; **(b) BBPBAP Jepara:** 1 tambak udang di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan 4 tambak bandeng di Kabupaten Tangerang/Mauk; **(c) BLUPPB Karawang:** 1 tambak bandeng di Kabupaten Karawang; **(d) BPBAP Takalar:** 1 tambak bandeng di Kabupaten Pangkep. Penghitungan capaian Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah kluster tambak udang dan bandeng siap operasional merujuk pada definisi siap operasional yang pengukurannya dilakukan akhir tahun.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	15	13	9	9	9	100	-	>120

Berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster), maka beberapa upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2024 meliputi :

a. Penetapan Kelompok

Menetapkan kelompok penerima bantuan pembangunan kluster tambak udang dan revitalisasi kluster tambak bandeng yang meliputi :

- Penetapan kelompok penerima bantuan klaster udang yaitu pokdakan anak langkat bertuah di Kabupaten Langkat,
- penetapan kelompok penerima bantuan klaster udang di Kabupaten Pangandaran yaitu kelompok vanamei Putra Pamotan,
- penetapan kelompok penerima bantuan revitalisasi kluster tambak bandeng berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan pada triwulan sebelumnya yaitu: Kelompok Makmur Bahari di Kabupaten Gresik, Kelompok Mina Payau Mandiri dan Sukses Bersama Mina Payau Mandiri di Kabupaten Karawang, Kelompok Sungguminasa di Kabupaten Pangkep, serta di Mauk Kabupaten Tangerang.

b. Pelaksanaan pembangunan kluster tambak udang

Perkembangan pembangunan 2 (dua) kluster udang yang berlokasi di 2 (dua) Kabupaten, sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pembangunan kluster udang di Kabupaten Langkat dengan progress 100% dengan serapan anggaran Rp. 5.484.597.000-

- Telah dilaksanakan pembangunan kluster udang di Kabupaten Pangandaran dengan progress 100% dengan serapan anggaran Rp. 5.458.972.020,-
- Pada kluster udang Kab. Langkat dilaksanakan monitoring dan evaluasi proses budidaya.
- Pada kluster udang Kab. Pangandaran dilaksanakan monitoring dan evaluasi proses budidaya.

c. Pelaksanaan revitalisasi kluster tambak bandeng

Revitalisasi 7 (tujuh) kluster tambak bandeng yang berlokasi di 4 (empat) kabupaten, terdiri dari :

- Kabupaten Gresik, dengan progress pekerjaan 100% dengan serapan anggaran Rp. 683.058.600,-
- Kabupaten Tangerang, dengan progress pekerjaan 100 % dengan serapan anggaran Rp. 2.767.499.640,-
- Kabupaten Pangkep, dengan progress pekerjaan 100% dengan serapan anggaran Rp. 686.305.484,-
- Kabupaten Karawang dengan progress pekerjaan 100% dengan serapan anggaran Rp. 696.726.391,-
- Upaya yang telah dilaksanakan selama triwulan IV yaitu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi proses budi daya pada kluster tambak udang.

IKU.3 Kawasan Budi Daya Udang yang Direncanakan Saluran Irigasinya (Kawasan)

Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya merupakan lokasi yang direncanakan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan air guna mendukung peningkatan perikanan budi daya. Perencanaan terhadap perbaikan sistem tata air tambak dalam pembangunan kawasan budi daya perikanan mengacu pada rencana *Detail Engineering Design* (DED) kawasan tambak.

Cara pengukuran Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan menghitung banyaknya kawasan budi daya udang yang akan direncanakan saluran irigasinya. Indikator kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) merupakan indikator yang baru dimunculkan pada Tahun 2024 dan pengukurannya dilakukan secara Tahunan. Perolehan sumber data terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut berasal dari Tim kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	4	-	1	1	1	100	-	>120

Pada Triwulan IV untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I telah dilakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Telah disusun dan ditetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ikan Air Laut nomor 52/DJPB.2/PB.220/I/2024 Tentang Tim Pembahas Penyusunan DED Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Januari 2024 dan ditetapkan perubahannya sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ikan Air Laut nomor 3652/DJPB.2/PB.220/IV/2024 Tentang Perubahan Tim Pembahas Penyusunan DED Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Mei 2024;
- b. Telah dilakukan penyusunan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS serta *Draft* Rancangan Kontrak. Dokumen Pengadaan ini telah disampaikan kepada Keala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa melalui Nota Dinas Nomor 38/DJPB.2/PB.220/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 untuk dapat dilanjutkan dengan metode lelang umum;
- c. Telah disusunnya dan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Lokasi Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 Januari 2024;
- d. Telah dilakukannya koordinasi terkait dengan lokasi prioritas pekerjaan pada tanggal 25 Januari 2024 antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan Direktorat Ikan Air Laut;
- e. Menerima Nota Dinas dari UKPBJ KKP Nomor 321/PBJ.4.2/PL,460/II/2024 tanggal 27 Februari, dimana dijelaskan bahwa pemenang lelang adalah PT. Sapta Adhi Pratama dengan nilai klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 1.116.819.840,00;
- f. Telah dilakukan Persiapan Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa dan menerbitkan Surat Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I Nomor 2102/DJPB.2/PB.220/ SPPBJ/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- g. Telah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 2153/DJPB.2/K/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 2154/DJPB.2/SPMK/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- h. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan kontrak pada tanggal 14 Maret 2024 di Kabupaten Indramayu;
- i. Penyedia telah menyerahkan Laporan Konsepsi Perancangan sesuai dengan Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan Termin I Nomor 01/BA-PAKET1/KKP-SAP/DED/IV/2024 Tanggal 17 April 2024;

- j. Telah dilakukan Pembayaran Termin I sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 3251/DJPB.2/PL.420/BAP-T1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 111.681.984;
- k. Penyedia telah menyerahkan Laporan Pra Rancangan sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Termin II Nomor 05/BA-PAKET1/KKP-SAP/DED/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024;
- l. Telah dilakukan Pembayaran Termin II sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 4571/DJPB.2/PL.420/BAP-T2/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 sebesar Rp. 223.363.968;
- m. Telah dilakukan pembahasan Laporan Pengembangan Rancangan pada tanggal 25-28 Juni 2024;
- n. Telah dilakukan pembayaran Termin III tanggal 19 Juli 2024;
- o. Telah dilakukan pembahasan laporan Rancangan Detail pada tanggal 13-16 Agustus 2024;
- p. Telah dilakukan pembayaran Termin IV termasuk serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 30 Agustus 2024;
- q. Telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I kepada Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu melalui surat nomor: B.2406/DJPB.2/PB.220/X/2024 tentang Penyerahan Data DED Kawasan Tambak T.A. 2024 tanggal 10 Oktober 2024;
- r. Telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dan jajarannya melalui rapat penyerahan data DED Kawasan Tambak T.A. 2024 pada tanggal 16 Oktober 2024.

Sampai dengan Triwulan IV pekerjaan penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I tidak ditemukan kendala yang mempengaruhi kinerja kegiatan. Rekomendasi pada Triwulan III telah ditindaklanjuti yaitu kegiatan serah terima hasil DED kepada instansi terkait khususnya Kementerian PUPR. Direkomendasikan untuk kegiatan selanjutnya agar dilakukan pemilihan lokasi kegiatan penyusunan DED Kawasan Tambak yang disesuaikan dengan RPJMN dan Renstra yang baru, mengingat RPJMN yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 telah habis masa berlakunya serta Renstra DJPB hanya berlaku untuk 2020-2024. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV terserap 99,69% atau sebesar Rp. 1.495.296,777 dari pagu Rp1.500.000.000.

IKU.4 Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)

Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (kawasan) merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Perikanan Budi Daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi tambak tertier merupakan kawasan yang memperoleh dampak dari kegiatan PITAP.

Capaian indikator kinerja tersebut berupa dampak saluran dari hasil pekerjaan PITAP dengan target 8 (delapan) kawasan. Penanggung jawab Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) berada di Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	35	12	8	12	>120	-	>120

Cara pengukuran Indikator kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) dilakukan dengan menghitung jumlah Kawasan perikanan budi daya yang memperoleh dampak pengairan irigasi tambak tertier dari kegiatan PITAP. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut telah diketahui pada Triwulan III sesuai dengan target yang telah direncanakan dan serah terima pekerjaan PITAP.

Pada Triwulan IV terdapat penambahan 4 (empat) paket kegiatan PITAP yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, Bekasi, Kendal, dan Gresik sehingga kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi bertambah menjadi 12 kawasan. Hal tersebut berdampak pada Indikator Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi terealisasi 150 % yaitu sebanyak 12 kawasan. Dalam pencapaian Indikator tersebut, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka capaian Indikator kinerja tersebut mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan target Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket) juga mengalami penurunan pada Tahun 2024. Rincian capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi Tahun 2024

Kabupaten	Poklina	Kecamatan	Desa	Jumlah Kawasan	Realisasi Panjang Saluran (M')	Luas Terairi (Ha)
Cirebon	Kali Jaka	Jati Merta	Gunung Jati	1	563,00	20
Demak	Sumber Rejeki	Banjarsari	Sayung	1	1.624,00	56,8
Lamongan	Sedulur Tani	Glagah	Glagah	1	1.200,00	63,7
Tangerang	Banyu Bina Bersama	Pagedangan Ilir	Kronjo	1	714,50	20,06
Subang	Tani Jaya	Anggasari	Sukasari	1	2.640,00	128
		Anggasari	Sukasari			

Kabupaten	Poklina	Kecamatan	Desa	Jumlah Kawasan	Realisasi Panjang Saluran (M')	Luas Terairi (Ha)
Pekalongan	Kerto Mina Mandiri	Kemplong	Wiradesa	1	586,58	26
Banyuwangi	Wringin Putih Makmur	Wringin Putih	Muncar	1	2.913,89	83,98
		Wringin Putih	Muncar			
Maros	Julu Kana	Marannu	Lau	1	1.050	85
Lampung Selatan	Waway Karya	Ketapang	Pematang Pasir	1	1.213,27	100
Bekasi	Harmoni	Muaragembong	Pantai Mekar	1	1.500,00	150
Kendal	Tirto Mulyo	Brangsong	Purwokerto	1	1.396,86	81
Gresik	Gotong Royong	Ujungpangkah	Pangkahweta n	1	750.00	120
TOTAL				12	16.152,10	934,54

Dampak dari kegiatan PITAP Tahun Anggaran 2024 pada 12 Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi telah ter rehabilitasi saluran tambak sepanjang 16.152,10 m' dan luas lahan tambak yang terairi sebesar 934,54 Ha.

SS.3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU.5 Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)

Indikator persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%) merupakan alat berat excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha budi daya perikanan agar meningkatkan produktifitas budi daya perikanan. Target indikator persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan (%) sebesar 75% yang diukur pada akhir tahun. Pada tahun 2024, nomenklatur Indikator tersebut merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja tahun 2023 yaitu Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%). Sebagai dampaknya, maka capaian pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2023.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan persentase realisasi bantuan excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dibandingkan dengan realisasi excavator yang telah diterima kelompok penerima. Capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan laporan pemanfaatan excavator ke masyarakat dan Berita Acara Serah Terima Barang (Excavator). Jumlah bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan ke masyarakat pada Tahun 2024 berjumlah 96 unit. Pencapaian indikator sarana kawasan budidaya yang disalurkan berupa excavator menjadi tanggung jawab Tim Kerja Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
	-	-	-	78,94	75	78,94	105,25	-	>120

Capaian Indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) baru akan dilakukan pengukurannya pada akhir Tahun. Secara umum tahapan pendistribusian excavator ke masyarakat, dilakukan melalui tahapan : (1) identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL); (2) verifikasi dan penetapan CPCL; (3) persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (4) serah terima bantuan excavator; dan (5) penyusunan laporan pemanfaatan oleh kelompok penerima bantuan excavator.

Selama Triwulan IV, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%), antara lain : (i) dilakukannya verifikasi terhadap Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) ke kelompok masyarakat berdasarkan pengajuan proposal CPCL dan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Excavator Tahun 2024 dengan nomor 383 tahun 2023 beserta perubahannya dengan nomor 17 tahun 2024. Hingga triwulan IV dimana SK penetapan kelompok bantuan alat berat excavator kepada masyarakat sampai tahap 25 dengan jumlah 95 kelompok penerima dengan keterangan serah terima alat berat excavator telah selesai dilaksanakan meliputi 95 unit kepada kelompok masyarakat, 3 unit kepada UPT Lingkup DJPB yakni BPBAT Tatelu, BPBAT Sungai Gelam, dan BLULPPB Karawang, serta 1 unit kepada PPN Pekalongan. Alat berat excavator tersebut untuk mendukung sarana kegiatan budi daya di UPT. (ii) pengadaan barang dan jasa pengiriman alat berat melalui e-katalog dengan memperhatikan ketentuan terkait penggunaan produk dalam negeri nilai TKDN dan BMP dan kualifikasi usaha kecil serta koperasi (UMKK). Pengadaan alat berat excavator yakni merek Pindad dengan 2 type yaitu mini (Excava 55) dan standar (Excava 140F). Pada penyedia jasa pengiriman alat berat sampai triwulan IV mencapai 26 tahap dengan penyedia PT. Nusantara Citra Terpadu, PT. Gajah Sora Perkasa, PT. Adhigana Jagat Mandiri, CV. Optima Karya Mandiri, PT. Gandiwa Express Solution, dan PT. Kahar Sayan Perkasa. dan (iii) serah terima alat berat excavator yang telah direalisasikan kepada masyarakat yaitu 95 kelompok penerima bantuan di 85 Kabupaten/Kota dan dilakukan commissioning oleh mekanik dari PT. Pindad. Pada saat proses serah terima alat berat excavator kepada penerima bantuan, dijelaskan pula mengenai pelaporan pemanfaatan alat berat excavator terhadap rencana yang sudah dituangkan dalam proposal yang diajukan dan penjelasa terkait asuransi alat berat excavator. Pada kegiatan tersebut dilakukan uji coba dan uji fungsi, serta pengecekan kelengkapan toolkit alat berat excavator. Setelah proses tersebut dilaksanakan, dilakukan penandatanganan BAST oleh ketua

kelompok penerima.

Persentase bantuan alat berat excavator pada kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat mencapai 78,95%, dimana alat berat excavator yang tersalurkan kepada masyarakat berjumlah 95 kelompok penerima dengan 75 kelompok penerima yang sudah memanfaatkan alat berat excavator. Selain itu juga terdapat alat berat excavator yang tersalurkan ke UPT yakni 3 unit kepada UPT Lingkup DJPB yakni BPBAT Tatelu, BPBAT Sungai Gelam, dan BLULPPB Karawang, serta 1 unit kepada PPN Pekalongan. Alat berat excavator tersebut untuk mendukung sarana kegiatan budi daya perikanan di Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 10. Daftar Excavator yang telah Didistribusikan ke Masyarakat Tahun 2024

No.	Provinsi	No.	Kabupaten /Kota	No.	Nama Kelompok	Tersalurkan	Termanfaatkan
1	Aceh	1	Aceh Besar	1	Kelompok Maju Bersama	1	1
		2	Aceh Tenggara	2	Pokdakan Tojung Maju	1	1
		3	Aceh Utara	3	Kelompok Keuramat Jaya Kilometer Enam	1	1
				4	Kelompok Usaha Tani Tambak Awak Awai	1	1
2	Sumatra Utara	4	Samosir	5	Ringgas Mangula	1	1
		5	Batubara	6	Kelompok Perikanan Mekar Bersama	1	1
		6	Nias Utara	7	Pokdakan Sanuwu	1	1
		7	Tapanuli Selatan	8	Koperasi Perikanan dan Pertanian (PERIPER) Tapanuli Selatan	1	1
3	Sumatra Barat	8	Pesisir Selatan	9	Koperasi Produsen Gerakan Ekonomi Dua Puluh	1	1
		9	Padang Pariaman	10	Pokdakan Karya Mina	1	1
		10	Pasaman	11	Pokdakan Putri Tunggal	1	1
4	Riau	11	Pelalawan	12	Taruna Jaya	1	1
		12	Bengkalis	13	Kelompok Vaname Bom Nawasena	1	1
5	Bengkulu	13	Bengkulu Utara	14	Pokdakan Millenial Cat Fish	1	1
				15	Pokdakan Mina Tanjung	1	
6	Jambi	14	Kota Jambi	16	Yayasan Rakyen Putra Jambi	1	1
7	Sumatra Selatan	15	Musi Rawas	17	Pokdakan Mina Rezeki Wonokerto	1	1
		16	Penukal Abab Lematang Ilir	18	Pokdakan Harapan Maju	1	1
		17	Banyuasin	19	Gapokkan Lima Cahaya Sakti	1	1
8	Lampung	18	Lampung Utara	20	Pokdakan Blambangan Harapan Jaya Abadi	1	1
		19	Lampung Selatan	21	Pokdakan Sungai Mili Terus	1	
		20	Tulang Bawang	22	Pokdakan Way Dente Mina Sejahtera	1	1
				23	Pokdakan Windu Sejahtera	1	1
		21	Tulang Bawang Barat	24	Maju Bersama Tubaba	1	1

No.	Provinsi	No.	Kabupaten /Kota	No.	Nama Kelompok	Tersalurkan	Termanfaatkan
		22	Pesisir Barat	25	Pokdakan Wai Balak	1	
9	Bangka Belitung	23	Bangka Selatan	26	KSU Barokah	1	1
10	Banten	24	Pandeglang	27	Yayasan Pendidikan Islam Baitussalmandedi Mandala Tirta	1	1
		25	Serang	28	Pokdakan Tani Tambak Taman Kelapa	1	1
				29	Pokdakan OP Mandiri Vaname	1	
11	Jawa Barat	26	Bogor	30	Pokdakan Rimba Jaya	1	1
		27	Cianjur	31	Koperasi Syariah Al Mubarakah	1	1
		28	Garut	32	Yayasan Al-Amin Garut Selatan Indonesia	1	
		29	Indramayu	33	Koperasi Bahari Tiga Serangkai	1	1
				34	Koperasi Mina Babajaring Mulya	1	1
				35	Pokdakan Bina Balung Sejahtera	1	1
		30	Subang	36	Pokdakan Wana Tambak Jaya	1	1
		31	Sukabumi	37	Yayasan Al-Fath	1	1
		32	Tasikmalaya	38	Yayasan Miftahul Huda Indonesia	1	1
		33	Pangandaran	39	Pokdakan Cilebok Permai	1	1
34	Subang	40	Kelompok Tani Tambak Jaya Mega	1			
12	DI Yogyakarta	35	Sleman	41	Kelompok Budidaya Ikan Mino Ngremboko	1	1
13	Jawa Tengah	36	Magelang	42	Pokdakan Wono Minasari	1	1
		37	Klaten	43	Pokdakan Mina Sejahtera	1	1
		38	Kebumen	44	Pokdakan Waja Makmur	1	1
		39	Cilacap	45	Koperasi Bondan Maju Sejahtera	1	1
		40	Brebes	46	Pokdakan Bersama Lancar	1	1
		41	Pemalang	47	Kelompok Produsen Mina Tapang Sari	1	
		42	Blora	48	Pokdakan Tunas Jaya Dukuh Padas	1	1
		43	Pati	49	Pokdakan Mina Lestari	1	1
		44	Rembang	50	Pokdakan Tani Makmur	1	1
14	Jawa Timur	45	Nganjuk	51	Pokdakan Al-Khoiriyah	1	
		46	Ponorogo	52	Yayasan Ponpes Al-Bukhori Mangunan	1	1
		47	Blitar	53	Pokdakan Saman Lestari	1	
		48	Sidoarjo	54	Koperasi Agar Makmur Sentosa	1	1
		49	Bangkalan	55	Pokdakan Seleber Jaya	1	1

No.	Provinsi	No.	Kabupaten /Kota	No.	Nama Kelompok	Tersalurkan	Termanfaatkan
		50	Lamongan	56	Pokdakan Sedulur Tani	1	1
15	Kalimantan Barat	51	Sambas	57	Pokdakan Kompak	1	1
		52	Sintang	58	Pokdakan Mandiri Juwau Agro	1	1
16	Kalimantan Selatan	53	Kotabaru	59	Pokdakan Mutiara Biru	1	1
		54	Tanah Bumbu	60	Koperasi Pendamaran Berjaya Sejahtera	1	
17	Kalimantan Tengah	55	Kotawaringin Barat	61	Pokdakan Barokah Jaya Kobar	1	
18	Kalimantan Timur	56	Kutai Kartanegara	62	Pokdakan Mitra Belayan	1	1
19	Nusa Tenggara Barat	57	Bima	63	Koperasi Pemasaran Ar – Rahman Jaya Mandiri	1	1
				64	Pokdakan Sangia Maju	1	1
				65	Koperasi Pemasaran Putra Bahari Express	1	1
				66	Pokdakan Nae Mandiri	1	1
		58	Sumbawa	67	Pokdakan Nanga Desa	1	1
		59	Lombok Tengah	68	Gapokdakan Putra Agung	1	
20	Nusa Tenggara Timur	60	Kupang	69	Pokdakan Sejahtera	1	1
		61	Manggarai Barat	70	Koperasi Nelayan Rumah Biru Sejahtera	1	1
		62	Sikka	71	Pokdakan Alpha Omega Cristo Re	1	1
		63	Nagekeo	72	Koperasi Produsen Mitra Bahari Nagekeo	1	1
		64	Sabu Raijua	73	Kelompok Usaha Bersama Eikewengngi	1	
21	Sulawesi Barat	65	Mamuju Tengah	74	Pokdakan Benur Super	1	1
		66	Mamuju	75	Pokdakan Eksport II	1	
		67	Polewali Mandar	76	Pokdakan Mampie Bersatu	1	1
22	Sulawesi Selatan	68	Bone	77	Pokdakan Tunas Muda	1	1
		69	Luwu	78	Yayasan Ruhama Pondok Pesantren Hidayatullah	1	1
				79	Pokdakan Tarusan	1	1
		70	Sidenreng Rappang	80	Maddeppa Teppaja	1	
		71	Jeneponto	81	Pokdakan Berkah	1	
		72	Pangkajene Kepulauan	82	Koperasi Bandeng Sejahtera Manakku	1	1
		73	Pinrang	83	Pokdakan Suka Maju	1	1
74	Gowa	84	Pokdakan Cahaya Salekowa	1	1		
23	Sulawesi Tengah	75	Tolitoli	85	Kelompok Ogo Payau	1	
24	Sulawesi Utara	76	Minahasa Selatan	86	Pokdakan Mapallus	1	1
		77	Minahasa Utara	87	Pokdakan Surya Laut	1	1
		78	Kota Manado	88	Universitas Sam Ratulangi	1	
		79	Bolaang Mongondow Timur	89	Koperasi Produsen Kuda Laut Mangkit	1	
25	Gorontalo	80	Bone Bolango	90	Pokdakan Alam Sutera	1	1

No.	Provinsi	No.	Kabupaten /Kota	No.	Nama Kelompok	Tersalurkan	Termanfaatkan
26	Maluku	81	Buru	91	Pokdakan Bina Bupolo Sejahtera	1	1
		82	Seram Bagian Barat	92	Pokdakan Gunung Mulya	1	1
27	Maluku Utara	83	Pulau Taliabu	93	Seho Kano	1	
28	Papua Barat	84	Sorong	94	Pokdakan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan	1	1
29	Papua Selatan	85	Merauke	95	Pokdakan Semangat Tani	1	1
TOTAL						95	75

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) diantaranya: keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi penerima dan kendala terkait pendaftaran kusuka perorangan/korporasi oleh penyuluh. Selain itu juga kendala dalam pemanfaatan alat berat excavator oleh kelompok penerima yaitu cuaca yang buruk pada lokasi penerima bantuan pemerintah, sehingga alat berat excavator tidak dapat beroperasi di tambak budi daya. Menurut informasi dari kelompok penerima bahwa pemanfaatan alat berat excavator terkendala juga pada alat bantu kerja berupa ponton yang dibeli oleh kelompok belum selesai, sehingga alat berat excavator belum dapat digunakan di tambak.

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap kendala yang dihadapi pada triwulan IV yaitu koordinasi dengan kelompok, dinas perikanan Kabupaten/Kota, dan penyuluh perikanan lebih intens terutama di lokasi yang jaringan internetnya terbatas, serta membantu penyampaian terkait kendala kusuka oleh admin kusuka yang ada di DJPB dan Pusdatin. KKP juga berkoordinasi dengan kelompok, dinas perikanan Kabupaten/Kota, beserta penyuluh perikanan guna kelengkapan proposal yang diajukan untuk bantuan alat berat excavator. Penjelasan terkait juknis bantuan alat berat excavator tahun 2024 saat pelaksanaan verifikasi dan pelaporan pemanfaatan alat berat excavator saat serah terima di kelompok penerima bantuan pemerintah. Untuk pemenuhan capaian realisasi alat berat excavator yang termanfaatkan oleh masyarakat, KKP mengirimkan surat permohonan laporan pemanfaatan kepada kelompok penerima dan dinas perikanan Kabupaten/Kota.

Serapan pagu anggaran dalam upaya mencapai indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) hingga Triwulan IV sudah mencapai 99.98% yakni 128,910,491,455 dari pagu anggaran 128,933,000,000 yang dialokasikan.

IKU.6 Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi tambak tersier berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan. Target indikator persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi sebesar 10 paket.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan banyaknya saluran irigasi tambak tersier yang direhabilitasi dengan perolehan sumber data yang berasal dari Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut. Indikator Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket) merupakan penyesuaian dari indikator yang ditetapkan Tahun 2023 yaitu : Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%)

Tabel 11. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
50	55	65	55	14	10	14	>120	-	>120

Pada Tahun 2023, Indikator kinerja yang ditetapkan terkait pekerjaan PITAP yaitu : Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi berdasarkan usulan masyarakat (%), dengan target 80%. Akan tetapi, terkait dengan target kegiatan PITAP pada Tahun tersebut ditetapkan sebanyak 55 paket yang seluruhnya terealisasi 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Triwulan yang sama pada tahun 2024 maka capaian kegiatan PITAP terealisasi sebesar 18,18%, disebabkan adanya penurunan target IKU saluran irigasi tambak yang direhabilitasi.

Pada akhir triwulan IV, Capaian indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket), telah terealisasi melampaui 100 % dengan penyaluran sebanyak 14 Paket di 12 Kabupaten yang dapat dilihat rinciannya pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) TA. 2024

Provinsi	Kabupaten	Poklina	Ketua Poklina	Paket	Anggaran	Progres Pekerjaan Fisik (%)
Jawa Barat	Cirebon	Kali Jaka	E. Rochadi	1	170,000,000	100
Jawa Tengah	Demak	Sumber Rejeki	Sudarno	1	170,000,000	100
Jawa Timur	Lamongan	Sedulur Tani	Abdul Qohar	1	170,000,000	100
Banten	Tangerang	Banyu Bina Bersama	Ahmad Sopiyan Bahadi	1	170,000,000	100
Jawa Barat	Subang	Tani Jaya	Juheri Heryana	2	340,000,000	100
Jawa Tengah	Pekalongan	Kerto Mina Mandiri	Wahrodji	1	170,000,000	100
Jawa Timur	Banyuwangi	Wringin Putih Makmur	Syahrul Ahmad Yusuf	2	340,000,000	100
Sulawesi Selatan	Maros	Julu Kana	Safaruddin	1	170,000,000	100
Lampung	Lampung Selatan	Waway Karya	Suparlan	1	170,000,000	100
Jawa Barat	Bekasi	Harmoni	Agus Mardani	1	170,000,000	100

Provinsi	Kabupaten	Poklina	Ketua Poklina	Paket	Anggaran	Progres Pekerjaan Fisik (%)
Jawa Tengah	Kendal	Tirto Mulyo	Nur Izudin	1	170,000,000	100
Jawa Timur	Gresik	Gotong Royong	Abdullah Fais	1	170,000,000	100
TOTAL				14	2,380,000,000	

Pada Triwulan IV, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Rekomendasi untuk selanjutnya, diharapkan POKLINA dapat melaksanakan pemeliharaan saluran PITAP secara swadaya selama 2 (dua) tahun kedepan untuk menjaga kelancaran sirkulasi air budidaya. Hingga akhir triwulan IV, anggaran yang telah terserap dalam mencapai IKU Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%) yaitu Rp. 3.261.563.003 dari pagu Rp. 3.267.000.000 atau 99,83 %.

SS.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan

Sasaran meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

IKU 7. Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)

Indikator kinerja Persentase NSPK di Kesehatan Ikan merupakan dokumen NSPK yang disusun oleh Tim Kerja NSPK dan Kelembagaan yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. NSPK di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu NSPK di bidang residu dan bidang penyakit ikan dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 75%. Pengukuran Indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kumulatif dengan target kumulatif dalam renstra dalam kurun waktu 2020-2024.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada triwulan III Tahun 2023. Target dokumen NSPK yang akan dihasilkan pada Tahun 2024 sebanyak 7 dokumen bidang kesehatan ikan berupa Peraturan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan dokumen RSNI bidang kesehatan ikan. Pengukuran capaian Indikator kinerja Persentase NSPK di Kesehatan Ikan yang disusun (%) dilakukan secara triwulanan. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024

No	NSPK	Target (dokumen)	Produk NSPK
1	Bidang Residu	6	Revisi Peraturan Menteri (1 dokumen), Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2 dokumen), dan RSNI3 (3

No	NSPK	Target (dokumen)	Produk NSPK
			dokumen)
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (1 dokumen)
	Total	7	

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	83	100	75	100	>120	-	>120

Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi sebesar 100% namun jika dibandingkan dengan target tahunan maka telah melampaui tercapai 133,33%. Selanjutnya, secara realisasi jumlah NSPK yang telah disusun di bidang kesehatan ikan berjumlah 7 dokumen, yaitu :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 60 tahun 2024 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Rencana Surveilans Resistensi Antimikroba Tahun 2024.
- d. RSNI3 : Nekropsi ikan bersirip untuk tujuan diagnosis penyakit.
- e. RSNI 3 : Metode pengambilan contoh uji untuk pemeriksaan penyakit pada ikan dan krustasea yang bernilai tinggi tanpa mematikan (*non-lethal*).
- f. RSNI 3 : Uji kesehatan benur peneaid siap tebar;
- g. Revisi Peraturan Menteri KP Nomor : 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi yang telah diterbitkan menjadi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/Permen-Kp/2019 Tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi, 21 November 2024.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2024

No	NSPK	Target Tahunan	Produk NSPK	Target Triwulan IV (Dokumen)	Target Triwulan IV (%)	Realisasi Triwulan IV (Dokumen)	Capaian Triwulan IV (%)
1	Bidang Residu	6	Keputusan Direktur Jenderal	6	75	6	100

No	NSPK	Target Tahunan	Produk NSPK	Target Triwulan IV (Dokumen)	Target Triwulan IV (%)	Realisasi Triwulan IV (Dokumen)	Capaian Triwulan IV (%)
			Perikanan Budi Daya, RSNI dan Perubahan PerMen KP 37/PERMEN-KP/2019				
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	1		1	
	JUMLAH	7		7		7	

Dalam upaya mendorong tercapainya Indikator kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%), telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya : (i) Harmonisasi Peraturan perundangan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024; dan (ii) Rapat Teknis RSNI 3 bidang Kesehatan Ikan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2024.

Kegiatan Rapat Teknis 3 merupakan tahap akhir perumusan RSNI 3 di tingkat Kementerian Teknis yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut di BSN menjadi SNI. RSNI yang dibahas pada rapat teknis RSNI 3 yang akan dihitung menjadi capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%). Pada tahun 2024, Direktorat Ikan Air Laut mengajukan 3 judul RSNI melalui Sekretariat Komtek 65-07, seperti pada tabel berikut:

Tabel 16. Judul dan Konseptor Rapat Teknis RSNI 3 bidang Kesehatan Ikan 2024

No.	Judul	Konseptor	Instansi	Keterangan
1.	Nekropsi ikan bersirip untuk tujuan diagnosis penyakit	Wiwini Wiyani & Ratna Amalia Kurniasih	BPKIL Serang	Revisi SNI 7907:2013
2.	Metode pemeriksaan penyakit pada ikan bernilai tinggi tanpa mematikan (<i>non-lethal</i>)	Wiwini Wiyani & Ratna Amalia Kurniasih	BPKIL Serang	Revisi SNI 7955:2014
3.	Uji kesehatan benur penaeid siap tebar secara laboratoris	Sri Murti Astuti	BBPBAP Jepara	Revisi SNI 7957:2014

Anggaran kegiatan perumusan RSNI bidang Kesehatan Ikan telah terealisasi Rp 210,723,000 dari Pagu Rp 210,723,000 atau sebesar 100%.

IKU 8. Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%)

Tingkat kualitas implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian residu nasional yang bertujuan untuk mengukur kualitas terhadap kinerja implementasi terhadap NRMP. Pelaksana kegiatan NRMP berada di 26 Provinsi dengan obyek monitoring residu berupa komoditas bandeng, lele, nila, patin, dan udang dengan target sampel monitoring residu secara nasional berjumlah 4.000 sampel. Penanggung jawab indikator kinerja Tingkat Kualitas Implementasi NRMP berada di Tim kerja NSPK dan Kelembagaan.

Pelaksana kegiatan monitoring residu melalui kegiatan pengambilan sampel hingga pengujian sampel di 26 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Capaian diukur berdasarkan data yang disajikan di dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu (SIMPR) dengan mengukur aspek kesesuaian, kepatuhan dan ketercapaian. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan melaukan penilaian terhadap 3 aspek, sebagai berikut:

1. **Aspek Kesesuaian (bobot 30%)**, yaitu evaluasi kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi:
 - Kesesuaian Target Sampel masing-masing Provinsi (Implementasi – dokumen NRMP)
 - Kesesuaian Target Lokasi monitoring residu pada unit pembesaran dan pembenihan (Implementasi – dokumen NRMP).
2. **Aspek Kepatuhan (bobot 30%)**, yaitu evaluasi terhadap SOP terhadap (a) penginputan data monitoring residu pada aplikasi SIMPR, (b) Kriteria pengambilan sampel dan (c) pemenuhan mekanisme jika ditemukan ketidaksesuaian hasil pengujian (*Non Compliance*);
3. **Aspek ketercapaian (bobot 40%)**, diukur berdasarkan capaian terhadap target sampel di masing-masing Provinsi.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	95,05	95,56	94	95,56	101,65	-	101,65

Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) merupakan indikator baru ditetapkan pada triwulan III Tahun 2023 yang merevisi Indikator sebelumnya yaitu Indikator kinerja Persentase sampel ikan yang dimonitor kandungan residunya (%). Hasil pengukuran terhadap capaian indikator

Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) di 26 Provinsi

No	Provinsi	Komoditas	Aspek Penilaian			Persentase Implementasi NRMP (%)
			Kesesuaian (30%)	Kepatuhan (30%)	Ketercapaian (40%)	
1	Aceh	Udang	30	24	40	94
2	Sumatera Utara	Udang	30	26,28	40	96,28
		Nila	30	25,8	40	95,8
3	Sumatera Barat	Udang	30	24	40	94
		Nila	30	29,46	40	99,46
4	Riau	Udang	30	28,5	40	98,5
		Patin	30	25,5	40	95,5
5	Jambi	Patin	30	27,00	40	97
6	Bangka Belitung	Udang	30	27,72	40	97,72
7	Sumatera Selatan	Udang	30	29,28	40	99,28
		Patin	30	30,00	40	100,00
8	Bengkulu	Udang	30	27,48	40	97,48
9	Lampung	Udang	30	24,06	40	94,06
10	Banten	Udang	30	24,2856	40	94,29
11	Jawa Barat	Udang	30	25,86	24,56	80,42
		Lele	30	26,58	40	96,58
		Nila	30	25,44	40	95,44
12	Jawa Tengah	Udang	30	26,10	40	96,10
		Nila	30	25,38	40	95,38
13	DI Yogyakarta	Udang	30	24,54	40	94,54
14	Jawa Timur	Udang	30	24,34	40	94,34
		Bandeng	30	24,36	40	94,36
		Nila	30	24	40	94
		Lele	30	23,98	40	93,98
15	Bali	Udang	30	28,50	40	98,50
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	30	28,74	40	98,74
17	Kalimantan Barat	Udang	30	24,48	40	94,48
18	Kalimantan Selatan	Udang	30	29,70	40	99,70
19	Kalimantan Tengah	Udang	30	24	40	94
		Patin	30	24	40	94
20	Kalimantan Timur	Udang	30	24	40	94
21	Kalimantan Utara	Udang	30	24	40	94
22	Sulawesi Tenggara	Udang	30	29,88	40	99,88
23	Sulawesi Tengah	Udang	30	24	40	94
24	Sulawesi Selatan	Udang	30	24,72	40	94,72

No	Provinsi	Komoditas	Aspek Penilaian			Persentase Implementasi NRMP (%)
			Kesesuaian (30%)	Kepatuhan (30%)	Ketercapaian (40%)	
		Bandeng	30	25,08	40	95,08
25	Sulawesi Barat	Udang	30	24,00	40	94,00
26	Gorontalo	Udang	30	24,48	43,28	97,76
	Total		1140,00	983,52	1507,84	3631,36
	Nilai IKU Implementasi NRMP		30	25,88	39,68	95,56

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa persentase Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan realisasi 100% sedangkan perolehan capaian terendah berada di Provinsi Jawa Barat untuk komoditas Udang. Hal tersebut dipengaruhi aspek ketercapaian memiliki nilai yang rendah diakibatkan realisasi sampel yang belum memenuhi target. Tidak terpenuhinya target sampel diakibatkan tidak tersedianya lokasi pengambilan sampel yang memenuhi kriteria. Meskipun demikian secara total sampel yang dialokasikan di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan target alokasi sampel dikarenakan target sampel udang yang tidak terealisasi dialihkan menjadi target sampel lele dan sampel nila. Secara keseluruhan bahwa capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) termasuk kategori **"SANGAT BAIK"**.

Indikator kinerja monitoring residu yang dituangkan di dalam Renstra 2020-2024 pada tahun 2024 berjumlah 26.000 sampel, namun target sampel tersebut mengalami penurunan menyesuaikan ketersediaan anggaran Tugas Peantuan di 26 Provinsi. Pada tahun 2024, secara jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 4.000 sampel namun pengambilan sampel baru dilakukan pada Triwulan III. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Residu yang sebelumnya melalui Dana Dekonsentrasi kemudian menjadi Tugas Peantuan. Hal tersebut membutuhkan tahapan yang harus dilakukan Satker Tugas Peantuan di Dinas Provinsi agar anggaran dapat dimanfaatkan, antara lain : Penetapan PPK, mengangkat bendahara, hingga mengajukan pembukaan rekening Virtual Account ke KPPN yang selanjutnya dilaporkan pada aplikasi SPRINT. Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong capaian sampel monitoring residu yaitu dengan memantau dan mengkoordinasikan secara intensif upaya yang harus dilakukan Satker Dinas KP di 26 Provinsi dalam kaitannya dengan tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran Tugas Peantuan.

Tabel 19. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Tahun 2024

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Aceh	Udang	133	113	100
2	Sumatera Utara	Udang	118	122	103,38

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
		Nila	47	47	100
3	Sumatera Barat	Udang	20	20	100
		Nila	38	38	100
4	Riau	Udang	22	22	100
		Patin	55	55	100
5	Jambi	Patin	55	55	100
6	Bangka Belitung	Udang	59	59	100
7	Sumatera Selatan	Udang	109	109	100
		Patin	51	51	100
8	Bengkulu	Udang	42	42	100
9	Lampung	Udang	385	385	100
10	Banten	Udang	46	49	106,52
11	Jawa Barat	Udang	311	191	61,41
		Lele	94	153	162,76
		Nila	67	128	191,04
12	Jawa Tengah	Udang	125	125	100
		Nila	73	73	100
13	DI Yogyakarta	Udang	42	48	114,28
14	Jawa Timur	Udang	264	264	100
		Bandeng	72	72	100
		Nila	73	96	131,51
		Lele	73	96	131,51
15	Bali	Udang	57	61	107,01
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	423	423	100
17	Kalimantan Barat	Udang	60	60	100
18	Kalimantan Selatan	Udang	74	74	100
19	Kalimantan Tengah	Udang	8	8	100
		Patin	34	34	100
20	Kalimantan Timur	Udang	95	104	109,47
21	Kalimantan Utara	Udang	76	83	109,21
22	Sulawesi Tenggara	Udang	322	322	100
23	Sulawesi Tengah	Udang	114	114	100
24	Sulawesi Selatan	Udang	112	121	108,04
		Bandeng	67	67	100
25	Sulawesi Barat	Udang	99	99	100
26	Gorontalo	Udang	85	92	108,23
			4000	4095	102,37

Dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *Nasional*

Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) telah dilakukan beberapa rencana aksi, seperti : (i) Penyusunan *annual report 2023* dan *National residue monitoring plan (NRMP) 2024* yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2023; (ii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 59 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024 (iii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 60 Tahun 2024 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka verifikasi implementasi pengendalian residu (Pusat) tahun 2024 telah terealisasi sebesar 98,06 % atau Rp 119,169,900,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 121.526.000,00

IKU 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala)

Indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan didefinisikan tingkat serangan penyakit ikan pada wilayah tertentu yang ditunjukkan dengan warna hijau, kuning dan merah pada peta sebaran penyakit ikan. Tingkat serangan penyakit ikan yang dimaksud merupakan hasil kegiatan monitoring penyakit ikan yang dilakukan di 34 Provinsi yang dilaporkan oleh operator Software Sistem Monitoring Penyakit Ikan (SSMPI) Dinas Perikanan Provinsi melalui SSPMI online. Jumlah sampel penyakit ikan yang dimonitor untuk mengetahui tingkat serangan penyakit ikan sebanyak 755 sampel.

Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan. Penghitungan indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan bersifat maximize yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi semakin baik.

Tabel 20. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)

No	Tingkat Serangan Penyakit Ikan	Kategori Tingkat Serangan penyakit ikan	Warna pada peta sebaran penyakit ikan	Skala
1	Berat	≥ 60 %	Merah	1
2	Sedang	30 – 60 %	Kuning	2
3	Ringan	≤ 30 %	Hijau	3

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit ikan (Skala) Tahun 2024

2020	Realisasi				2024			Renstra 2020-2024	
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	3	3	2	3	>120	-	>120

Realisasi indeks serangan penyakit ikan sebesar 3 yang menunjukkan tingkat serangan penyakit ikan ringan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit ikan telah berjalan dengan baik karena tingkat serangan penyakit rendah. Berdasarkan tingkat serangan penyakit terdapat 1 (satu) tingkat serangan penyakit ikan sedang dengan nilai skala 2 (dua) dan terdapat 16 (enam belas) tingkat serangan penyakit ikan ringan dengan nilai skala 3 (tiga). Data dukung pencapaian indeks serangan penyakit ikan dapat di lihat pada Tabel 22 berikut ini

Tabel 22. Hasil pengujian sampel positif dalam monitoring penyakit ikan tahun 2024

No	Penyakit Ikan	Jumlah sampel	Positif	Negatif	Prosentase (%)	Tingkat Serangan	Skala
1	Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)	158	26	132	16,46	Ringan	3
2	Hepatopancreatic microsporidiosis (EHP)	56	10	46	17,86	Ringan	3
3	Enteric septicemia of catfish (ESC)	54	4	50	7,41	Ringan	3
4	Ichthyophthiriasis	24	0	24	0	Ringan	3
5	Infection with infectious myonecrosis (IMNV)	32	3	29	9,4	Ringan	3
6	Infection with koi herpesvirus (KHV)	40	3	37	7,5	Ringan	3
7	Motil Aeromonas septicemia (MAS)	119	22	97	18,49	Ringan	3
8	Infection with Megalocytivirus (Red Seabream Irido virus)	40	2	38	5	Ringan	3
9	Fish mycobacteriosis (<i>Mycobacterium fortuitum</i>)	8	4	4	50	Sedang	2
10	Streptococcosis (<i>Streptococcus agalactiae</i>)	33	0	33	0	Ringan	3
11	Streptococcosis (<i>Streptococcus iniae</i>)	8	0	8	0	Ringan	3
12	Tilapia lake virus disease (TiLV)	116	21	95	18,1	Ringan	3
13	Vibriosis	9	1	8	11,1	Ringan	3
14	Viral encephalopathy and retinopathy (VNN/VER)	39	7	32	17,95	Ringan	3
15	Infection with white spot syndrome virus (WSSV)	127	7	120	5,51	Ringan	3
16	Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)	1	0	1	0	Ringan	3
17	Channel Catfish virus Disease	1	0	1	0	Ringan	3

No	Penyakit Ikan	Jumlah sampel	Positif	Negatif	Prosentase (%)	Tingkat Serangan	Skala
	TOTAL	865	110	755	12,72		

Monitoring penyakit ikan melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) pada tahun 2024 dialokasikan kepada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Tahun 2024 diperoleh dari hasil pelaksanaan monitoring penyakit ikan yang pengukurannya dilakukan secara tahunan.

Monitoring penyakit ikan dilakukan melalui anggaran TP di 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan direncanakan dilakukan terhadap 15 penyakit ikan yaitu *Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)*, *Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (HPM-EHP)*, *Viral encephalopathy and retinopathy (VER/VNN)*, *Enteric septicemia of catfish (ESC)*, *Motile Aeromonas septicemia (MAS)*, *Infection with tilapia lake virus (TiLV)*, *Infection with Megalocytivirus*, *Infection with infectious myonecrosis (IMNV)*, *Infection with white spot syndrome virus (WSSV)*, *Streptococcosis (Streptococcus agalactiae)*, *Streptococcosis (Streptococcus iniae)*, *Infection with koi herpesvirus (KHV)*, *Fish mycobacteriosis (Mycobacterium fortuitum)*, *Vibriosis* dan *Ichthyophthiriasis (Ichthyophthirius multifiliis)* namun dalam pelaksanaannya terdapat penambahan 2 penyakit ikan yaitu *Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)* dan *Channel Catfish virus Disease (CCVD)*

Pelaksanaan surveilan/monitoring penyakit ikan dilakukan di 34 provinsi dengan target sampel yang diambil dan diuji sebanyak 755 sampel. Realisasi sampel pada triwulan IV berjumlah 865 sampel atau sekitar 185,85% dari target tahunan. Secara detail jumlah sampel untuk setiap provinsi yang direncanakan dan yang telah terealisasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 23. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Tahun 2024

No	Provinsi	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase (%)
1	Aceh	27	27	100
2	Sumatera Utara	23	23	100
3	Sumatera Barat	26	12	46
4	Riau	26	32	123,08
5	Bengkulu	23	23	100
6	Kepulauan Riau	30	39	130
7	Jambi	34	48	141,17
8	Sumatera Selatan	23	26	113,04
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	25	108,69
10	Lampung	30	31	103,33
11	Banten	8	9	112,5

No	Provinsi	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase (%)
12	DKI Jakarta	26	39	150
13	Jawa Barat	56	57	101,78
14	Jawa Tengah	53	73	137,74
15	DI Yogyakarta	30	43	143,33
16	Jawa Timur	30	30	100
17	Bali	15	15	100
18	Nusa Tenggara Barat	30	32	106,67
19	Nusa Tenggara Timur	8	8	100
20	Kalimantan Barat	19	24	126,32
21	Kalimantan Tengah	8	13	162,5
22	Kalimantan Timur	19	33	173,68
23	Kalimantan Utara	19	20	105,26
24	Kalimantan Selatan	23	23	100
25	Sulawesi Utara	8	10	125
26	Sulawesi Selatan	26	30	115,38
27	Sulawesi Tengah	15	15	100
28	Gorontalo	23	23	100
29	Sulawesi Tenggara	15	19	126,67
30	Sulawesi Barat	15	15	100
31	Maluku Utara	11	11	100
32	Maluku	11	15	136,36
33	Provinsi Papua	11	11	100
34	Papua Barat	11	11	100
Total		755	865	114,57

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala) pada triwulan IV adalah 1) terdapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang melakukan pengujian sampel berbeda dengan yang telah dialokasikan dan (2) terdapat lokasi yang tidak dilakukan pengambilan sampel. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui media sosial terkait dengan pelaksanaan monitoring penyakit ikan melalui anggaran tugas pembantuan tahun 2024. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka melakukan pendampingan pengendalian penyakit ikan tahun 2024 sebesar Rp218.312.000 dengan serapan sebesar Rp 259.728.642,- atau 99,69%.

IKU 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%)

Indikator kinerja mengenai *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan pelaksanaan

mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloksasin.

Pengujian resistensi antimikroba dilaksanakan di 15 UPT- DJPB dengan target indikator kinerja sebesar 35%. Penghitungan indikator kinerja Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) diukur pada akhir tahun dan bersifat minimize yang menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat resistansi antimikrobanya maka semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya. Jumlah sampel ikan yang diuji untuk mengetahui hasil uji yang resisten terhadap antimikroba sebanyak 735 sampel.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	14,33	14,05	35	14,05	>120	-	>120

Realisasi persentase sampel ikan yang resistan terhadap antimikroba (%) sebesar 14,05% diperoleh dari rata-rata nilai resistensi bakteri *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio alginolyticus*, *Aeromonas hydrophila* dan *Escherichia coli*. Data dukung pencapaian realisasi persentase sampel ikan yang resistan terhadap antimikroba (%) dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Bakteri Patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Tahun 2024

No	Bakteri	Jumlah sampel positif	Jumlah sampel Resisten ENR	Jumlah sampel Resisten TE	Jumlah sampel Resisten OTC	Resistensi ENR (%)	Resistensi TE (%)	Resistensi OTC (%)
1	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	157	16	8	3	10,19	5,09	1,91
2	<i>Vibrio alginolyticus</i>	63	2	0	2	3,17	0	3,17
3	<i>Aeromonas hydrophila</i>	71	4	23	23	5,63	32,39	32,39
4	<i>Escherichia coli</i>	75	7	25	24	9,33	33,33	32
Total			29	56	52			
Rata-rata resistensi						7,08	17,71	17,37
Capaian Indikator Kinerja						14,05		

Selanjutnya, realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba sampai dengan triwulan IV berjumlah 1366 sampel atau sekitar 185,85% dari target tahunan yang dilakukan oleh 15 UPT DJPB. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 26 berikut

Tabel 26. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB

No	UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target sampel Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Prosentase Realisasi (%)
1	Balai Budi Daya Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung	59	86	145,76
2	Balai Besar Perikanan Budi Daya Perikanan Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi	70	134	191,43
3	Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau (BBPBAP) Jepara	70	155	221,43
4	Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Batam	34	42	123,53
5	Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Lombok	35	40	114,28
6	Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Ambon	35	55	157,14
7	Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam	35	84	240
8	Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	35	50	142,86

No	UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target sampel Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Prosentase Realisasi (%)
9	Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	21	26	123,81
10	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Situbondo	56	70	125
11	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	35	37	105,71
12	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Takalar	35	62	177,14
13	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang	56	58	103,57
14	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem	35	40	114,29
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	124	427	344,35
Total		735	1366	185,85

Prosentase realisasi sampel tertinggi dicapai oleh BPKIL Serang Sukabumi dengan capaian sebesar 344,35% dan terendah BLUPPB Karawang sebesar 103,57%. Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) pada triwulan IV yaitu (1) sulitnya mengisolasi bakteri target, (2) terdapat UPT yang secara target komoditas tidak tercapai, dan (3) terdapat UPT yang hasil uji identifikasi bakteri target negatif sehingga tidak dapat dilanjutkan dengan uji sensitivitas antimikroba. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan UPT DJPB agar melakukan enrichment atau pengkayaan dalam melakukan isolasi bakteri target. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka NSPK bidang AMR tahun 2024 sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 95.112.257 atau 95,11%.

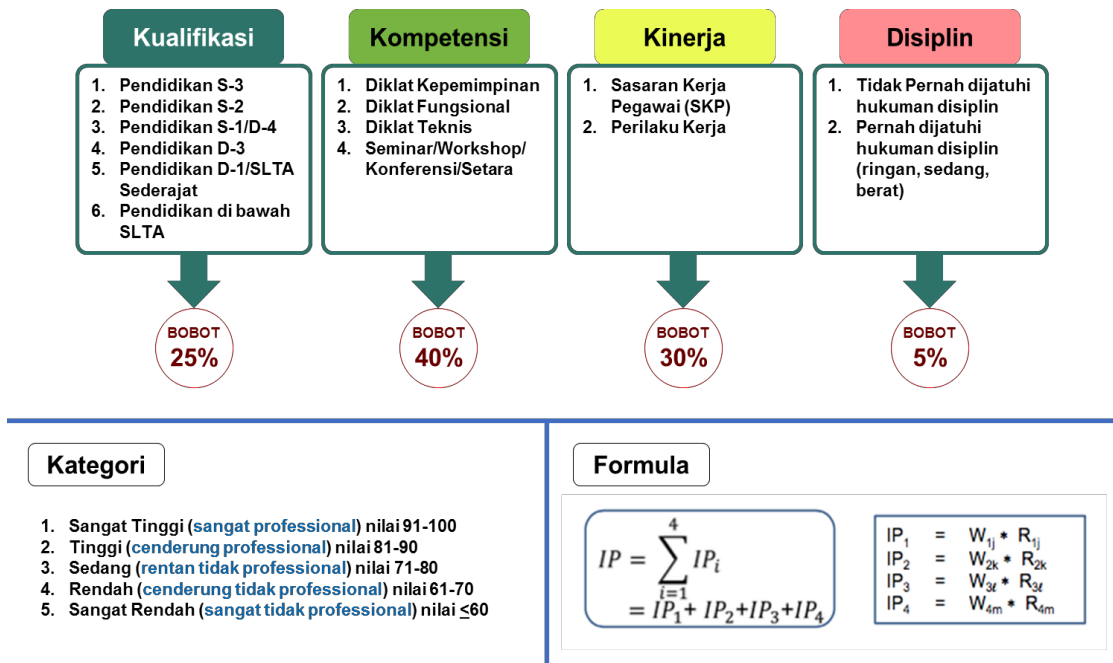
SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 8. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Pengukuran capaian IP ASN dilakukan pada semester 1 dan semester 2 pada tahun berjalan sehingga realisasi berikutnya pada akhir semester.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024

2020	Realisasi				2024			Renstra 2020-2024	
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
55,81	66,39	83,66	83,07	84,18	85	84,18	99,03	76	99,03

Pada Renstra DJPB 2020-2024, target IKU yang ditetapkan merupakan Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai) sebesar 76, namun target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja menjadi lebih besar yaitu 85. Perolehan nilai IP ASN dilakukan berdasarkan penghitungan 4 (empat) komponen IP ASN.

Pada semester II, perolehan data capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) disampaikan melalui Surat Nomor B.262/DJPB.1/KP.720/I/2025, 13 Januari 2025 tentang Capaian IKU IP-ASN Tahun 2024 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan nilai perolehan dimasing-masing aspek sebagai berikut : a) Kualifikasi dengan nilai 21,81; b) Kompetensi dengan nilai 30,13; c) Kinerja dengan nilai 27,30 dan d) Disiplin dengan nilai 5. Meskipun capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) termasuk kategori Tinggi namun bila dibandingkan dengan target Tahun 2024, maka capaian belum terpenuhi seluruhnya atau 99,03%. Terkait hal tersebut, kedepannya perlu mendorong Komponen IP ASN yang memiliki bobot terbanyak yaitu aspek Kompetensi. Berikut merupakan perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Tabel 28. Perbandingan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Semester II Tahun 2024 Lingkup DJPB

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi (bobot 25)	Kompetensi (bobot 40)	Kinerja (bobot 30)	Disiplin (bobot 5)		
1	Sekretariat DJPB	21,01	32,41	25,92	5,00	84,33	Tinggi
2	Dit Ikan Air Laut	21,81	30,13	27,30	4,95	84,18	Tinggi
3	Dit Rumput Laut	21,57	37,76	25,14	5,00	89,46	Tinggi
4	Dit Ikan Air Tawar	21,61	33,79	25,79	5,00	86,18	Tinggi

5	Dit Ikan Air Payau	21,94	25,92	25,14	5.00	78	Sedang
---	--------------------	-------	-------	-------	------	----	--------

IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	58,05	81,55	82	81,55	99,45	-	>120

Hasil pencapaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) telah disampaikan melalui Surat Nomor : B. 4948/DJPB.1/HP.440/VII/2024, 24 Juli 2024 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024. Adapun Penilaian Mandiri SAKIP telah dilaksanakan di BLUPPB Karawang terdiri dari

beberapa tahapan antara lain (a) pengantar pelaksanaan pendampingan SAKIP, (b) Profilling dokumen SAKIP pada www.esr.menpan.go.id, (c) kick off penilaian mandiri SAKIP, (d) penyusunan rekomendasi, (e) pendampingan tindak lanjut, dan (f) penyampaian hasil.

Berdasarkan surat diatas, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan yang sekarang menjadi Direktorat Air Laut memperoleh Nilai 81,55 dengan Predikat A. Hasil penilaian pada Tahun 2024 lebih baik dibandingkan Tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai 58,05 dengan predikat CC. Namun, apabila realisasi Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Tahun 2024 dibandingkan target tahunan yang ditetapkan maka capaian belum terpenuhi 100%. Adapun aspek yang perlu dilakukan peningkatan kualitasnya, yaitu diantaranya : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendorong target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan komponen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Pada Tahun 2024, telah dilakukan penginputan data capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut melalui aplikasi e kinerjaku serta penyusunan dokumen pengukuran kinerja, antara lain : Evaluasi Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Dokumen tersebut nantinya diupload di aplikasi ESR MenPan maupun e-kinerjaku sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP. Disamping itu kedepannya, perlu memperhatikan hasil penilaian masing-masing komponen manajemen yang tertuang di dalam Surat Nomor B. 4948/DJPB.1/HP.440/VII/2024, 24 Juli 2024 sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kualitas PM SAKIP dalam mendorong capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP di tahun berikutnya.

IKM. 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan IV Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menjadi objek pengawasan.

$$\text{Pengukuran Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Telah ditindaklanjuti Tuntas}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diberikan}} \times 100\%$$

Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
100	93,46	86,96	100	92,68	80	92,68	115,85	80	115,85

Pada renstra DJPB 2020-2024 terdapat penetapan target IKU Indikator Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) pada tahun 2024 sebesar 80. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 93,94% (tuntas 790 dari 841 rekomendasi). Rincian capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) masing-masing Satker disampaikan pada Tabel 31 berikut ini.

Tabel 31. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	93,94
2	Direktorat Ikan Air Tawar	93,94
3	Direktorat Ikan Air Laut	92,68
4	Direktorat Rumput Laut	100
5	Direktorat Ikan Air Payau	93,94

Upaya yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), yaitu mengupayakan langkah tindak lanjut terkait dengan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal yang disampaikan melalui Surat T.18/ITJ.3/HP.550/X/2024, 7 Januari 2025 mengenai Revisi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan IV TA 2024 yang didalamnya menginformasikan bahwa adanya sisa temuan yang tercantum pada LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 di Satker Direktorat Ikan Air Laut dengan sisa sebanyak satu temuan dengan satu saran dan nilai keuangan sebesar Rp41.426.478,00 belum dilengkapi dengan bukti

dukung.

Sampai dengan saat pemantauan 30 September 2024, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan (Dir. Ikan Air Laut) belum melengkapi bukti dukung yang dimaksud sehingga upaya yang harus dilakukan yaitu melakukan telaah/kajian atas sisa temuan pada LHP yang sudah cukup lama dan selanjutnya melakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud atau mengajukan status Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti (RTDD) kembali kepada Inspektur III.

IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
100	100	100	133,33	133,33	94	133,33	>120	90	104,4

Target IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB 2020- 2024, dengan nilai sebesar 90%. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup DJPB dilakukan atas (i) tingkat *sharing* dokumen mandatory dengan pembobotan 20%; (ii) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dengan pembobotan 40% serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP dengan pembobotan 40%.

Pusdatin telah melakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan

Perikanan, sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 pukul 00:00 WIB. Pada triwulan IV tahun 2024, target indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Laut ditargetkan angka 94 dengan realisasi 133,33 atau sebesar 141,84%.

Upaya yang dilakukan terhadap tercapainya target diatas melalui: penyebarluasan informasi menggunakan pladform *Portal Collaboration Office* yang diakses melalui <https://portal.kkp.go.id> (dengan mekanisme dan perhitungan yang disampaikan melalui Memorandum Nomor: 1996/DJPB.1/TU.210/VIII/2023, 30 Agustus 2023 tentang Penyampaian Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Periode Triwulan III Lingkup KKP. Penggunaan aplikasi tersebut menggantikan aplikasi Bitrix yang telah habis lisensinya pada tanggal 25 Juni 2023.

Berkaitan dengan perbandingan pencapaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV telah diinformasikan melalui Nota Dinas : 91/DJPB.1/TU.210/I/2025, 10 Januari 2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup DJPB Triwulan IV Tahun 2025.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Eselon II Direktorat Ikan Air Laut telah melampaui target Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) dan nilai yang sama juga diperoleh di seluruh unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan perolehan 133,33%.

IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup satker Direktorat Ikan Air Laut, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 33. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
90,50	72,5	94.39	94.83	92,88	80	92,88	116,10	80	-

IKU Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan target pada tahun 2023 sebesar 80%. Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Penghitungan capaian IKU Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) merupakan tahunan.

Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi)

dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa operasional dan kelengkapan bantuan, produksi dan pengelolaan bantuan secara berkelompok dengan **bobot 80%**;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban dengan **bobot 10%**;
3. Adaptasi (AT), yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan dengan **bobot 10%**.

Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

No	Jenis Bantuan	Jumlah		SKOR			
		Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	TOTAL
1	Excavator	7	7	71,43	8,57	5,71	85,71
2	Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	4	4	80	8,75	7,50	96,25
3	Kincir	11	9	71,11	7,78	6,67	85,71
	TOTAL	22	20	77,14	9,11	6,63	92,88

Hasil penilaian pemanfaatan bantuan pemerintah disampaikan melalui Surat Nomor: T.1026/TJ.3/HP.470/XI/2024, 19 November 2024 tentang Hasil Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis Bantuan Pemerintah Tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan secara uji petik pada tanggal 28 Oktober sd. 2 November 2023 oleh Inspektorat Jenderal KKP. Dengan hasil sebagai berikut :

a) Excavator

Seluruh bantuan excavator dalam kondisi lengkap, terpelihara, dan memiliki tempat penyimpanan tersendiri. Operasional excavator digunakan untuk pemeliharaan saluran inlet dan outlet tambak, IPAL, serta pembuatan saluran dan kolam baru. Pemanfaatan juga dilakukan untuk tambak atau kolam di luar milik kelompok dengan cara sewa.

b) PITAP

Bantuan PITAP telah dimanfaatkan oleh seluruh anggota kelompok. Kondisi saluran irigasi masih terpelihara, antara lain Poklina Tambak Jaya dan Poklina Windu Karya - Lampung Timur dengan frekuensi pemeliharaan mencapai 6 (enam) kali dalam setahun dan telah merencanakan pengembangan atau perluasan irigasi mencapai 1.000 meter.

Tabel 35. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Jenis Bantuan	Penanggung Jawab	Jumlah		Skor			Total
		Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	
Mesin Pakan Ikan	Dit. Ikan Air Tawar	3	2	57,50	10	2,50	70
Karamba Jaring Apung (KJA)	Dit. Rumput Laut	19	11	55,91	10	1,82	67,73
Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	Dit. Ikan Air Payau	6	6	80,00	10	6,67	96,67
Excavator	Dit Ikan Air Laut	7	7	71,43	8,57	5,71	85,71
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	Dit Ikan Air Laut	4	4	80	8,75	7,50	96,25
Kincir	Dit Ikan Air Laut	11	9	71,11	7,78	6,67	85,71

IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Laut (%) merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan tahun 2023, Capaian indikator kinerja tersebut terdiri dari kegiatan arsiparis, rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 6 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur setiap triwulannya. Pengukuran dilakukan terhadap 6 aspek dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Nilai pengawasan arsiparis = 60%
- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 95%
- Pengelolaan BMN = 95%
- Layanan Tata Usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

Tabel 36. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	94,13	94,77	80	94,77	118,46	80	-

IKU Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) belum ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. disebabkan Indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian indikator tersebut pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar **94,77%**. Perolehan angka capaian tersebut dapat dilihat pada data yang disajikan pada Tabel 37 berikut.

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut (%) Tahun 2024

No	Aspek Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Nilai pengawasan arsiparis	60	81,23
2	Kehadiran pegawai	85	97,12
3	Pengelolaan Keuangan	95	100
4	Pengelolaan BMN	95	100
5	Layanan tata usaha	73	100
6	Pengelolaan SDM Aparatur	72	90,28
	TOTAL	80	94,77

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada Triwulan IV tahun 2024, meliputi:

- **Nilai Pengawasan Arsiparis**

Nilai pengawasan arsiparis diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif, dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali yang dilakukan oleh Biro Umum. Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 2290/SJ.6/TU.220/IX/2024, tanggal 24 September 2024 tentang Ralat Pemeringkatan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2024 diperoleh nilai pengawasan arsiparis Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 mencapai 81,23 %. Nilai tersebut didapat dari 3 (tiga) aspek penilaian, yang meliputi : (i) Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) 47.53% dan (ii) Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK) 33.70% dengan kategori A (memuaskan). Berikut perbandingan Capaian Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan di Unit Eselon II Pusat Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Tabel 38. Perbandingan Capaian Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan di Unit Eselon II Pusat Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024

No	Unit Eselon II/Unit Pengolah	Nilai Aspek PAD (x50%)	Nilai Aspek SDK (x50%)	Nilai Aspek PAD +SDK (x100%)	Kategori
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	49,89	49,14	99,04	AA (sangat Memuaskan)
2	Direktorat Ikan Air Laut	47,53	33,70	81,23	A (Memuaskan)

No	Unit Eselon II/Unit Pengolah	Nilai Aspek PAD (x50%)	Nilai Aspek SDK (x50%)	Nilai Aspek PAD +SDK (x100%)	Kategori
3	Direktorat Rumput Laut	47,53	34,90	79,75	BB (Sangat Baik)
4	Direktorat Ikan Air Tawar	50,00	34,44	84,44	A (Memuaskan)
5	Direktorat Ikan Air Payau	45,01	32,09	77,10	BB (Sangat Baik)

- Kepegawaian**

Jumlah Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang PNS, 6 (enam) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) dan 7 (tujuh) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada bulan Desember menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

Tabel 39. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2024

No	Tim Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektif Kerja (Hari)	Target Hadir (OH)	Realisasi Kehadiran				Persentase Kehadiran
					Hadir di Kantor	Dinas Luar	Tugas Belajar	Jumlah	
1	Direktur Ikan Air Laut	1	63	63	17	46	0	63	100,00%
2	Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut	10	63	653	382	245	0	627	96,02%
3	Nspk Dan Kelembagaan Budi Daya Ikan Air Laut	7	63	441	237	178	0	415	94,10%
4	Kesehatan Dan Lingkungan Budi Daya Ikan Air Laut	11	63	693	315	296	63	674	97,26%
5	Prasarana Dan Sarana Budidaya Ikan Air Laut	13	63	819	392	420	0	812	99,15%
6	Dukungan Manajerial	11	63	693	447	229	0	676	97,55%
Total		53		3362	1790	1414	63	3267	
Persentase (%)									97,12%

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kehadiran masih dibawah dari target kehadiran 100% yang dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang sakit dan cuti.. Gambaran jumlah pegawai yang tidak hadir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan IV Tahun 2024

No	Kelompok/Bidang	Jumlah Pegawai	Ketidakhadiran (hari)					Persentase ketidakhadiran (%)
			Sakit	Cuti	Izin	Alpa	Jumlah (Hari)	
1	Direktur Ikan Air Laut	1	0	0	0	0	0	0,00%
2	Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut	10	14	12	0	0	26	0,77%
3	Nspk Dan Kelembagaan Budi Daya Ikan Air Laut	7	0	26	0	0	26	0,77%
4	Kesehatan Dan Lingkungan Budi Daya Ikan Air Laut	11	0	19	0	0	19	0,57%
5	Prasarana Dan Sarana Budidaya Ikan Air Laut	13	0	7	0	0	7	0,21%
6	Dukungan Manajerial	11	2	15	0	0	17	0,51%
Total		53	53	16	79	0	0	95
Persentase (%)								2,88%

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga. Pada Triwulan IV Tahun 2024, pengelolaan keuangan Direktorat Ikan Air Laut dapat dirinci pada Tabel 41.

Tabel 41. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

No	Proses Pembayaran	Kuantitas (Dokumen)	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Jumlah SPM -LS			
	SPM LS Bendahara	171	2.258.223.638	100,00%
	SPM LS Pihak Ketiga	55	16.471.991.376	100,00%
2	Jumlah GUP	0	-	100,00%
3	Jumlah TUP	0	-	100,00%
Jumlah Dokumen Pengajuan Pembayaran		226	18.730.215.014	
Prosentase (%)				100,00 %

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Ikan Air Laut mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2024. Data BMN yang dilakukan transaksi

keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 42. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Tahun 2024

No	Akun	Kuantitas	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Barang Konsumsi (unit)	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	134	141.544.263.490	100%
3	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	26	85.565.200.000	100%
Prosentase (%)				100,00 %

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Ikan Air Laut yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2023 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat. Pada Triwulan IV Tahun 2024, telah direalisasikan kegiatan tersebut dengan rincian pada tabel 43 berikut.

Tabel 43. Layanan Rapat Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

No	Tim Kerja	Permintaan (kali)	Realisasi (kali)	Persentase
1	Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut	1	1	100,00%
2	NSPK Dan Kelembagaan Budi Daya Ikan Air Laut	0	0	100,00%
3	Kesehatan Dan Lingkungan Budi Daya Ikan Air Laut	4	4	100,00%
4	Prasarana Dan Sarana Budidaya Ikan Air Laut	3	33	100,00%
5	Dukungan Manajerial	1	1	100,00%
Total		9	9	
Persentase				100,00%

- **Pengelolaan SDM Aparatur**

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen :

- Persentase perbandingan usulan kebutuhan ASN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tersedianya data Diklat ASN yang akuntabel.

- c) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- d) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
- e) Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

Berdasarkan surat Nomor : B.260/DJPB.1/KP.810/I/2025, 13 Januari 2025 tentang Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Aparatur, diperoleh nilai capaian indeks Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Air Laut yaitu 90,28 dengan predikat diatas Rata-Rata. Adapun perbandingan nilai capaian indeks Pengelolaan SDM Aparatur lingkup unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 44. Indeks Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

No	Unit Kerja	Komponen Indeks Pengelolaan SDM					Jumlah
		Usul Kebutuhan	Data Diklat	Layanan Mutasi	Layanan Kesejahteraan	Informasi Kepegawaian	
1	Sekretariat DJPB	20	15	23,21	20	20	98,21 (sangat baik)
2	Dit. Ikan Air Laut	17,78	15	17,5	20	20	90,28 (diatas rata-rata)
3	Dit. Rumput Laut	13,33	15	25	20	20	93,33 (Baik)
4	Dit. Ikan Air Tawar	20	15	25	20	20	100 (Sangat Baik)
5	Dit. Ikan Air Payau	20	15	15	20	20	90 (Diatas Rata-rata)

IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) tidak ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 sehingga indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang baru dikelola pada Tahun 2023. Penanggung Jawab Indikator Kinerja tersebut berada di Kelompok Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya dan Kelompok Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut.

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) merupakan Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara

elektronik. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan) yang dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2023 (31 Desember 2023).

Perhitungan indikator Perhitungan indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) berdasarkan Jumlah Kusuka yang mendapat bantuan dan terdaftar KUSUKA dibandingkan dengan pelaku usaha budi daya ikan yang menerima bantuan yang hasil pengukurannya pada akhir tahun.

Tabel 45. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	123,51	184,19	91	184,19	>120	-	>120

Target Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) difokuskan pada kegiatan bantuan pemerintah, berupa: excavator dan PITAP dengan target KUSUKA di masing-masing bantuan pemerintah, yaitu: 230 orang dan 80 orang. Realisasi Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) dapat dilihat pada Tabel 46 berikut.

Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Tahun 2024

No	Kegiatan	Jumlah Bantuan yang diserahkan ke Masyarakat		Penerima Bantuan yang terdaftar KUSUKA (orang)		Persentase (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Bantuan Excavator	96	95	230	285	124
2	PITAP	10	14	80	286	358
	TOTAL			200	571	184,19

IKM.18. Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2023 sehingga indikator tersebut tidak dicantumkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada,

Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut yang pengukurannya dihitung berdasarkan jumlah rencana aksi yang diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan rencana aksi yang dipersentasekan. Indikator kinerja tersebut diukur secara tahunan yang seluruhnya telah tercapai sebesar 100%.

Tabel 477. Capaian Indikator Kinerja Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	2	2	1	2	>120		>120

Realisasi data geospasial yang terintegrasi bidang perikanan budi daya sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% yaitu berupa 2 (dua) dokumen. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Deliniasi Petakan Tambak berdasarkan Citra Satelite SPOT 7 di Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

IKM.19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (%)

Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Laut merupakan tingkat serapan anggaran di Direktorat Ikan Air Laut yang penghitungan capaiannya diperoleh berdasarkan persentase realisasi anggaran Direktorat Ikan Air Laut dibandingkan dengan pagu anggaran Direktorat Ikan Air Laut.

Alokasi awal anggaran Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2024 sebesar 429.050.000.000 yang diimplementasikan untuk mencapai Indikator Kinerja di setiap unit kerja yang berada di bawah Direktorat Ikan Air Laut, dengan rincian: (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp1.350.000.000; (b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 139.200.000.000; (c) Sarana Perikanan Budidaya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000; (f) Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budidaya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000.

Pada bulan Maret 2024 terdapat revisi pagu menjadi Rp418.602.250.000 dengan rincian (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp902.250.000 b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 129.200.000.000; (c) Sarana Perikanan Budi Daya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp

1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000; (f) Infrastruktur budi daya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budi daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000. Revisi pagu tersebut dimaksudkan untuk realokasi anggaran ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang untuk mendukung pengembangan modelling nila salin.

Pada bulan Juli 2024 dilakukan revisi pagu menjadi Rp418.102.250.000 dengan rincian (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp902.250.000 b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 128.833.000.000; (c) Sarana Perikanan Budidaya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.367.000.000; (f) Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budidaya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000. Revisi pagu tersebut dimaksudkan untuk realokasi anggaran ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang untuk mendukung pengembangan modelling nila salin dan Budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) Kebumen untuk mendukung pengembangan budidaya udang berbasis kawasan.

Pada bulan November 2024 dilakukan revisi pagu menjadi Rp419.102.250.000 dengan rincian (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp902.250.000 b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 128.933.000.000; (c) Sarana Perikanan Budidaya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp3.267.000.000; (f) Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budidaya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000. Revisi pagu tersebut dimaksudkan untuk penambahan kegiatan PITAP Anggaran Tambahan Tahun 2024 di 4 Kabupaten.

Sejak Januari 2024 hingga saat ini masih terdapat kebijakan blokir anggaran terhadap pagu anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Budi Daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp 212.100.000.000 (Rp 50.000.000 dilakukan Automatic Adjustment (AA) dan Rp 162.100.000.000 menunggu adanya Loan Agreement sebagai Rupiah Murni Pendamping) dan pada bulan November 2024 terdapat tambahan blokir anggaran Infrastruktur budidaya udang yang di tingkatkan – IISAP senilai Rp1.122.987.000 dalam rangka penghematan perjalanan dinas. Pagu anggaran Direktorat Ikan Air Laut yang dapat dilaksanakan hanya Rp205.879.263.000.

Tabel 488. Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

Realisasi					2024			Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	99,42	97,68	98	97,69	99,67	-	>120

Tabel 499. Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024

No	Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
1	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	902.250.000	897.632.218	4.617.782
2	QEG	Bantuan Peralatan /Sarana	128.933.000.000	128.910.491.455	22.508.545
3	RAL	Prasarana Bidang Kemaritiman. Kelautan dan Perikanan	5.800.000.000	5.793.728.000	6.272.000
4	RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman. Kelautan dan Perikanan	70.244.013.000	66.266.712.523	3.977.300.477
Total			205.879.263.000	201.868.564.196	4.010.698.804

Sisa anggaran terbanyak terdapat pada output Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan (RBQ) dari kegiatan Infrastruktur budidaya udang yang di tingkatkan – IISAP senilai Rp4.756.839.481 yang salah satunya andil dari sisa kontrak DED *Consultant Laboratory Fish Farmers Cluster Pond* senilai Rp2.291.827.050, Belanja Jasa Konsultan senilai Rp1.500.553.669 terdiri dari Fasilitator Rp531,851,926, *Broodstock and Multiplication Centers Basic Design review* by Institute of Ocean Rp315.928.000 dan *Project Management Technical Consultants (PMTTC)* Rp650.773.743.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan budi daya ikan air laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Oktober - November 2024. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target tahunan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2024, dari total 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 15 (lima belas) Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan atau >100%, 2 (dua) Indikator Kinerja sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan atau 100%, 2 (dua) Indikator kinerja yang capaiannya dibawah target tahunan. Seluruh capaian Indikator kinerja Tahun 2024 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 mencapai nilai angka **“Istimewa”**



Gambar 9. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024

B. Saran

Pencapaian nilai kinerja organisasi Direktorat Ikan Air Laut merupakan kontribusi dukungan kinerja dari 5 (lima) Tim Kerja lingkup Direktorat dan *Stakeholder* terkait, sehingga diharapkan agar capaian nilai organisasi yang telah memenuhi target maupun melampaui target tahunan maupun target triwulan III Tahun 2024 dapat dipertahankan pada Triwulan berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang ditemui selama pencapaian kinerja organisasi baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif guna menghasilkan strategi/upaya yang mampu mendorong percepatan pencapaian kinerja. Dukungan seluruh pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut melalui tercapainya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan juga perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024, diketahui bahwa dari 19 (sembilan belas) Indikator kinerja, sebanyak 15 (lima belas) Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan, 2 (dua) Indikator Kinerja sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan atau 100%, dan 2 (dua) Indikator kinerja yang capaiannya dibawah target tahunan. Adapun permasalahan terkait capaian Indikator Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 yang mempengaruhi tidak optimalnya pencapaian Indikator Kinerja diantaranya; (i) belum seluruhnya excavator yang didistribusikan telah dimanfaatkan oleh penerima yang disebabkan pembelian alat bantu kerja berupa ponton oleh kelompok belum selesai, sehingga alat berat excavator belum dapat digunakan di tambak dan (ii) masih tersisa 1 (satu) temuan yang tercantum di LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 belum disertai dengan bukti dukung.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka perlu lakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan agar tidak menghambat capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan. Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Direktorat Ikan Air Laut sehingga dapat dijadikan titik balik bagi perbaikan kinerja pada Tahun berikutnya.